

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akibat tumbuhnya politik internasional sebagai konsekuensi globalisasi yang telah mengubah pola interaksi antar negara di dunia global, Amerika Serikat bukan lagi satu-satunya negara yang berkuasa di dunia; beberapa negara yang menguasai ekonomi, teknologi, atau politik telah muncul. Hal ini mengakibatkan perluasan kekuasaan di arena politik global. Perubahan lingkungan global disertai dengan peningkatan kompleksitas hubungan antar negara, sehingga meningkatkan signifikansi interaksi dalam sistem internasional. Pertumbuhan globalisasi, yang mempengaruhi industri setiap negara, telah mengurangi kontrol suatu negara atas batas-batas kedaulatannya. Manusia, atau yang kita sebut sebagai perdagangan manusia, telah menggantikan komoditas sebagai fokus utama transaksi kriminal di seluruh dunia. (O Sinaga, 2010).

Asia Tenggara merupakan salah satu lokasi atau wilayah di mana terjadi peningkatan yang nyata dalam jumlah perdagangan manusia. Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Indonesia, dan Kamboja adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang memiliki undang-undang anti-perdagangan manusia, menurut statistik ASEAN, dan akibatnya, mereka sangat rentan terhadap kejahatan tersebut. Lebih dari 200.000 orang menjadi korban perdagangan manusia di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menurut statistik dari Organisasi Migrasi Internasional (IOM). (IOM, 2019).

Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, jumlah insiden perdagangan manusia di Indonesia meningkat setiap tahun, dengan kasus baru yang terungkap setiap tahun. Indonesia merupakan negara sumber penting untuk perdagangan seks dan negara tujuan dan transit untuk perdagangan manusia ke tingkat yang lebih rendah. Banyak buruh migran Indonesia mengalami kerja paksa dan perbudakan utang di negara-negara Asia dan Timur Tengah yang lebih maju. Bahkan Indonesia, tujuan wisata seks dunia dan wisata seks remaja, tidak menimbulkan masalah. Menurut Dirjen Bina Pariwisata, antara 40.000 hingga 70.000 anak di bawah umur dieksploitasi untuk prostitusi domestik di Indonesia.(US Department of State Trafficking, 2011).

Perdagangan manusia di Indonesia merupakan salah satu contoh kejahatan transnasional (transnational crime). Hal ini berdampak dan menimbulkan ancaman langsung terhadap keselamatan pribadi setiap warga negara Indonesia. Untuk menghindari hukum, para pelaku kejahatan ini terkadang mempekerjakan banyak entitas pemerintah untuk menyelundupkan imigran gelap ke negara lain. Melihat kasus perdagangan orang sebagai masalah yang telah menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional, khususnya bagi masyarakat Indonesia, juga mengajak aktor non-negara untuk membantu mengatasi masalah perdagangan manusia dengan mengedukasi masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia dan dengan meneliti cara-cara perdagangan orang. Dengan keyakinan bahwa masyarakat dapat menghindari indikator perdagangan manusia ini, para pelaku kejahatan perdagangan manusia menggunakan tipu daya untuk membodohi korbannya.

Kementerian PPPA juga mencatat ada sembilan daerah utama yang menjadi asal korban perdagangan orang di Indonesia. Kedelapan daerah itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, dan Kepulauan Riau.

Kota Batam merupakan kota di Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia atau dikenal dengan SIJORI (Singapura – Johor (Malaysia) – Indonesia) menjadi segitiga pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Hal ini membuka peluang perkembangan ekonomi bagi ketiga negara tersebut, salah satunya adalah lapangan pekerjaan bagi TKI.

Namun semua itu masih banyak juga para Pekerja Migran Indonesia tidak memperhatikan aspek keselamatan dan dampak yang akan terjadi jika melalui agen ilegal. Masalah ekonomi membuat manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk mengambil setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut yang membuat banyak fenomena di bidang hukum, khususnya kejahatan perdagangan manusia.

Salah satu jalur yang digunakan korban perdagangan manusia adalah melalui wilayah Batam yang memiliki jalur pelayaran langsung ke Malaysia dan Singapura. Korban dan pedagang menggunakan Batam sebagai hub sebelum pergi ke tujuan akhir mereka, terutama Malaysia dan Singapura. Batam konon punya banyak pelabuhan rahasia. Pemukiman di sepanjang pantai Pulau Batam memiliki pelabuhan yang tidak sah di sini. Situs tersebut kemudian berubah menjadi tempat

bongkar muat produk gelap atau pengiriman korban perdagangan manusia tanpa dokumentasi yang memadai sambil menyamar sebagai TKI.

Dalam bentuk jaringan kejahatan transnasional terorganisir dan tidak terorganisir, perdagangan manusia telah menjadi bahaya bagi masyarakat, negara, dan negara, serta standar hidup yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tujuan untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia didasarkan pada prinsip-prinsip mulia, janji nasional dan internasional untuk menerapkan inisiatif pencegahan dini, mengambil tindakan terhadap pelaku untuk melindungi korban, dan mempromosikan kolaborasi. Undang-undang tentang perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang utuh dan terpadu bagi upaya penghapusan tindak pidana perdagangan orang.

Organisasi Internasional untuk Migrasi adalah salah satu aktor non-negara yang berperan aktif dalam membantu proses pencegahan perdagangan manusia (IOM). IOM adalah organisasi global yang berkomitmen untuk mempromosikan migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan semua orang. Sejak tahun 2003, IOM secara aktif membantu upaya Indonesia memerangi perdagangan manusia dengan mendukung pengembangan program penegakan hukum yang menyeluruh dan berjangka panjang. Perdagangan manusia internal dan eksternal Petualangan IOM di Indonesia dimulai pada tahun 1979 dan berlanjut pada tahun 1991 ketika pemerintah Indonesia bergabung dengan IOM sebagai pengamat. Pada tahun 2000, IOM dan pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama resmi untuk memerangi perdagangan manusia di Indonesia. Selain itu, IOM dan pemerintah Indonesia dan Australia membentuk Bali Process pada tahun 2002

untuk mengatasi masalah penyelundupan manusia, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional lainnya yang terkait dengan masalah ini.

IOM telah menjadi salah satu pemain dan mitra terpenting pemerintah Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia. IOM adalah sebuah IGO (Organisasi Pemerintah Internasional) atau organisasi antar pemerintah internasional yang misinya adalah untuk memastikan perlakuan yang tertib dan manusiawi terhadap migran, mempromosikan kerjasama internasional dalam isu-isu terkait migrasi, membantu dalam menemukan solusi praktis untuk masalah migrasi, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para migran yang membutuhkan. (Ajeng & Putri, 2019).

Sejak tahun 2005, kegiatan IOM di Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia telah difokuskan pada hal-hal berikut: mencegah tindakan perdagangan orang melalui peningkatan kesadaran dan pemantauan perekrutan tenaga kerja, melindungi korban perdagangan orang melalui bantuan langsung kepada korban, dan pembangunan kapasitas kelembagaan pemerintah dan aktor non-pemerintah; memperkuat sistem peradilan Indonesia dengan meningkatkan kapasitas penegakan hukum dan meningkatkan akses keadilan; dan memperkuat sistem peradilan Indonesia dengan meningkatkan kapasitas penegakan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan.

Di sini peran IOM adalah bagaimana upaya yang mereka lakukan untuk menangani kasus Hman Trafficking di kota Batam. IOM sangat berperan dalam membantu pemerintah untuk mencegah terjadinya perdagangan orang.

Berdasarkan dari judul penelitian yang diambil oleh peneliti ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan penelitian :

1. Penelitian dari Putri Utami pada tahun 2017 dengan judul “*UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI HUMAN TRAFFICKING DI BATAM*” Dewasa ini, baik di darat maupun di laut, perdagangan manusia merupakan kejahatan. Karena banyaknya perbatasan kecil dan tidak aman di Indonesia, sekarang lebih mudah untuk terlibat dalam kegiatan ini, khususnya di Batam. Batam memiliki jumlah kasus perdagangan manusia tertinggi antara tahun 2004 dan 2007. Mayoritas pengedar di Batam langsung pergi ke Malaysia dan Singapura untuk menukar korban dengan keuntungan. Para pelaku yang memperdagangkan para korban menghasilkan sejumlah besar uang dengan bekerja sebagai buruh migran sambil menggunakannya untuk tenaga kerja, eksploitasi seksual, dan bahkan penjualan organ tubuh. Ini memiliki efek yang signifikan pada tubuh dan pikiran. Untuk membatasi jumlah korban dan untuk meningkatkan legislasi dan perlakuan terhadap tenaga kerja asing, Indonesia harus menyelesaikan masalah perdagangan manusia ini.
2. Penelitian dari Dhani Akbar dan Indrawa pada tahun 2018 dengan judul “*TINJAUAN HUKUM DAN PERAN PEMERINTAH DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI KABUPATEN KARIMUN DAN KOTA BATAM*”. Penelitian ini menjelaskan tinjauan hukum bagi pelanggar atau pelaku kejahatan human trafficking di kota Batam.

Efektifitas penegakan hukum sangat berpengaruh dalam menyelesaikan kasus human trafficking yang terjadi. Dengan adanya bantuan dari organisasi Non Pemerintah, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan human trafficking dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mengurangi kegiatan Human Trafficking.

3. Penelitian dari Drs. Alif Oktavian., M.Si, dkk. PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MIGRATION (IOM) DALAM MENANGGULANGI KASUS HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa mata

kuliah Ilmu Hubungan Internasional, yaitu antara lain:

1. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan suatu organisasi formal yang beranggotakan lebih dari dua Negara untuk mencapai tujuan suatu perjanjian yang telah ditetapkan. Perlu diketahui, dalam sebuah kerja sama Organisasi Internasional diperlukan setiap aktor harus memiliki kualitas (termasuk karisma personalnya) agar dalam menjalankan negosiasi serta merealisasikan suatu program dapat dijalankan dengan baik.

2. Studi Keamanan Internasional

Mata kuliah ini membahas tentang keamanan di suatu negara di mana teknologi dan informasi berperan. Keamanan merupakan komponen terpenting dalam sebuah negara. Mata Kuliah ini membantu peneliti dalam menilai keamanan nontradisional di bidang keamanan siber suatu negara.

3. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional

Joshua Goldstein menggambarkan hubungan internasional sebagai disiplin ilmu politik, yaitu politik internasional, yang mengkaji keputusan dan perilaku negara terhadap negara lain, pada periode pasca-Perang Dingin. Kajian tentang politik internasional, termasuk hubungan antar bangsa dalam hal konflik, diplomasi, perdagangan, aliansi, interaksi dalam lembaga internasional, pertukaran budaya, dan lain-lain, merupakan komponen IR (Worldwide Connections) (Hadiwinata, 2017:13). Karen Mingst mendefinisikan hubungan internasional sebagai interaksi antara berbagai aktor yang terlibat dalam politik internasional, seperti negara, organisasi internasional, pemerintah, entitas sub-nasional seperti pemerintah lokal, dan individu. Definisinya didasarkan pada perspektif yang tidak lagi berpusat pada negara. Studi tentang tindakan para pemain ini saat mereka mengambil bagian dalam proses politik global, baik secara individu maupun kolektif, dikenal sebagai hubungan internasional (IR). (Hadiwinata, 2017:13).

4. Hukum Internasional

Mata kuliah ini membicarakan peraturan dan norma yang mengatur negara dan entitas lain yang dikenal berkepribadian internasional, misalnya organisasi internasional dan para individu, dalam hubungan satu sama lain. Melalui mata kuliah ini membantu peneliti untuk menganalisa Hukum Internasional yang dapat dijadikan sebagai supremasi hukum dalam negeri untuk mengatasi masalah Human Trafficking.

5. Migrasi

Mata kuliah ini membicarakan mengenai pemindahan dan mobilitas masyarakat dari dalam satu negara dan keluar dari negara. Melalui mata kuliah ini peneliti dapat menganalisis masalah human trafficking berkaitan dengan migrasi antar negara.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Masalah Mayor

Bagaimana peran IOM dalam menangani Human Trafficking di Kota Batam?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh IOM untuk menyelesaikan kasus perdagangan manusia di kota Batam?
2. Kendala yang dialami oleh IOM dalam membantu pemerintah menangani kasus perdagangan manusia ?
3. Bagaimana tingkat terjadinya Human Trafficking di Kota Batam pasca penanganan dari IOM ?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah penelitian dari tahun 2018-2022. Dikarenakan pada tahun 2018 IOM banyak melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Batam dan LSM-LSM dalam menangani kasus Human Trafficking.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ialah untuk mengungkapkan kejadian Perdagangan Orang yang telah terjadi di Kota Batam. Sebagai bahan dan gambaran bagi masyarakat kalangan umum, mahasiswa, dan penegak hukum di Indonesia khususnya di Kota Batam.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Human Trafficking di Batam.
2. Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan oleh IOM dalam menangani kasus Human Trafficking.
3. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi korban Human Trafficking

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai perdagangan orang dan bahan bacaan diperpustakaan bagi para pembaca.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis, serta orang tua dan masyarakat agar lebih waspada dalam melindungi dan mengawasi anggota keluarga dari perdagangan orang. Juga diharapkan dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang perdagangan manusia dan akibat hukumnya. Dan menjadi kritik dan ide bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan isu perdagangan manusia.

